



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
**UNIT KERJA** : PIMPINAN TERTINGGI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA
2. Jabatan : WALIKOTA
3. NHK : 38803

**II. DATA HARTA**

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.150.000.000
1. Bangunan Seluas 75 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
2. Tanah Seluas 630 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	738.600.000
1. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000		
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA JEEP Tahun 1983, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
4. MOBIL, TOYOTA COROLLA ALTIS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000		
5. MOTOR, HONDA BEAT STREET Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
6. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 419.600.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	285.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.495.388.340

**F. HARTA LAINNYA**

Sub Total

Rp. 4.668.988.340

**III. HUTANG**

Rp. ---

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 4.668.988.340

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkp.kpk.go.id](http://elhkp.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkp.kpk.go.id](http://elhkp.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila di kemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.